



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H. KAMALUDDIN SYAM DP
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 837535

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 8.100.300.000

1. Tanah Seluas 375 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 375 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 76 m2 di KAB / KOTA BARRU, HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000
4. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA BARRU, WARISAN Rp. 1.200.000.000
5. Tanah Seluas 364 m2 di KAB / KOTA MAROS, WARISAN Rp. 750.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 2145 m2/1 m2 di KAB / KOTA LUWU, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 380 m2/380 m2 di KAB / KOTA MAROS, Rp. 3.200.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 2708 m2/2.7 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 14795 m2/14795 m2 di KAB / KOTA MAROS, Rp. 300.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 631.500.000

1. MOTOR, KAWASAKI LX150 VARIAN 1 Tahun 2016, HASIL SENDIRI, LAINNYA, Rp. 16.000.000



2. MOTOR, YAMAHA MIO IM3 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
3. MOBIL, HONDA FREED Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
4. MOBIL, FAJERO FAJERO SPORT 2 4L DAKAR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	350.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	84.932.712
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	9.166.732.712
III. HUTANG	Rp.	335.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.831.732.712

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.